

# 2022

## RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARANGASEM



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 263 / HK / 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022, Perangkat Daerah wajib menyampaikan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun

- 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 15);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4); dan
  19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 5 Agustus 2021



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Kepala Bappeda Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Kepala Biro Penyusunan Program Setda Provinsi Bali, di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, di Denpasar.
6. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Para Asisten Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
10. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
12. Kepala Bank Pembangunan Daerah Cabang Karangasem, di Amlapura.
13. Yang Bersangkutan untuk maklum dan diindahkan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 263 / HK / 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

1. Renja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
2. Renja Dinas Kesehatan
3. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Renja Dinas Pemadam Kebakaran
6. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Renja Satuan Polisi Pamong Praja
9. Renja Dinas Sosial
10. Renja Dinas Ketenagakerjaan
11. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Renja Dinas Ketahanan Pangan
13. Renja Dinas Lingkungan Hidup
14. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
16. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
17. Renja Dinas Perhubungan
18. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
19. Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
20. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
21. Renja Dinas Kebudayaan
22. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23. Renja Dinas Perikanan
24. Renja Dinas Pariwisata
25. Renja Dinas Pertanian
26. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27. Renja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
28. Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
29. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
30. Renja Inspektorat Daerah

31. Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
32. Renja Sekretariat Daerah
33. Renja Kecamatan Karangasem
34. Renja Kecamatan Abang
35. Renja Kecamatan Kubu
36. Renja Kecamatan Bebandem
37. Renja Kecamatan Selat
38. Renja Kecamatan Rendang
39. Renja Kecamatan Sidemen
40. Renja Kecamatan Manggis





## KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan tahapan dari penyusunan rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah. Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan program/kegiatan tahun sebelumnya. Rencana kinerja Perangkat Daerah memuat analisis dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa mendatang.

Perencanaan suatu program menjelaskan hubungan garis organisasi secara kolektif yang menunjukkan sasaran apa yang hendak dicapai dan bagaimana setiap rupiah dialokasikan untuk memenuhi program dan sasaran tersebut. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus difaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi yang nyata untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Dengan telah disusunnya Rancangan RENJA tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.

Amlapura, 05 Agustus 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARANGASEM,



NWAYAN PUTU LABA ERAWAN, SH., MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19641231 199203 1 170

## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>Hal i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU .....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD .....	7
2.2. Analisis Kinerja pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	11
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD .....	13
2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	13
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....</b>	<b>14</b>
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional.....	14
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	14
3.3. Program dan Kegiatan .....	18
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>16</b>
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
- TABEL T-C.29	
- TABEL T-C.30	
- TABEL T-C.31	
- SK Bupati Nomor 454/HK/2020 tentang Tim Penyusunan Rencanna Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	

- **Berita Acara Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022**
- **Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Satuan Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi RENJA adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah. Dengan demikian RENJA Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Penyusunan RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi : evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional mengenai penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Rencana Kerja (RENJA) mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan,

RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah – langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD) dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dengan Pemerintah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kabupaten Karangasem merupakan sebuah organisasi perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) dibentuk sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Kabupaten Karangasem Tahun 2022 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 dan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

RENJA mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Renja DPM & PTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2022 berpedoman pada:

1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- 12 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
- 13 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
- 14 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karangasem Tahun 2012-2032.
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021
- 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana

19 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2022

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud RENJA DPM & PTSP Kabupaten Karangasem: merumuskan rencana kerja DPM & PTSP untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman:

- 1) pelaksanaan pelayanan Perangkat;
- 2) pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan;
- 3) penyusunan rencana anggaran Perangkat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyajian Renja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

#### **BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional



3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

3.3. Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Review evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Review didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra, dan perkiraan pelaksanaan DPA tahun berjalan yang baru disahkan. Sehubungan dengan Evaluasi terhadap Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Target Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat dalam Tabel T-C. 29.

DPM & PTSP Kabupaten Karangasem menyadari bahwa masih ada kelemahan/kekurangan yang harus diperbaiki dan dilakukan untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan guna mengetahui penyebab kekurangan/kegagalan tersebut sebagai umpan balik/feed back dari apa yang telah dan akan dilaksanakan.

Beberapa evaluasi realisasi kegiatan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan adalah adanya hambatan pelaksanaan kegiatan yang tidak teridentifikasi sebelumnya seperti adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan beberapa kegiatan difocussing dan tidak dapat terlaksana misalnya pelaksanaan kegiatan pameran investasi dan koordinasi goes to banjar.
  
- b. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra adalah adanya penurunan pelayanan modal penanaman modal dan pelayanan perizinan serta kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis DPM-PTSP Kabupaten Karangasem.

- c. Kebijakan/tindakan perencanaan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah mengadakan pendekatan dan penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dan review target kegiatan.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Realisasi Penanaman Modal adalah pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan oleh perusahaan PMA dan PMDN dalam bentuk kegiatan nyata. Perkembangan realisasi investasi sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi regional dan pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya satu sistem perekonomian yang berdaya saing terutama dalam upaya meraih pasar investasi. Kabupaten Karangasem yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia telah memberikan dukungan yang cukup tinggi terhadap perkembangan realisasi penanaman modal.

Realisasi PMA tahun 2020 sejumlah US\$ 1.255.250, realisasi PMA tahun 2019 sejumlah US\$ 1.780.006 sementara realisasi PMA tahun 2018 sejumlah US\$ 259.971.181 dan pada tahun 2017 sebesar US\$ 4.705.811.

Realisasi PMDN pada tahun 2020 sebesar Rp. 142.285.967.265 sedangkan realisasi PMDN tahun 2019 sebesar Rp. 200.965.030.089 realisasi PMDN pada tahun 2018 sebesar Rp. 3.367.220.929.711 dan sebelumnya pada tahun 2017 sebesar Rp. 176.056.000.000.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi dibidang perizinan DPM&PTSP Kabupaten Karangasem berupaya memberikan kemudahan bagi pengusaha dan memperpendek jalur birokrasi perizinan dimana proses perizinan dapat diselesaikan pada satu tempat dari mulai pendaftaran sampai pada pengeluaran izin sehingga akan dapat mempersingkat waktu penyelesaian perizinan. Beberapa bentuk layanan yang telah dilaksanakan yaitu :

1. Mall Pelayanan Publik

Dasar hukum penyelenggaraan yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik dengan menerbitkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 17 Tahun 2018 tentang Mall Pelayanan Publik. Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karangasem telah diresmikan tanggal 22 Juni 2018 oleh Menteri PAN & RB Republik Indonesia. MPP merupakan tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Adapun tujuan Mall Pelayanan Publik :

- 1) Memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.
- 2) Meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia.

Capaian pelayanan pada Mall Pelayanan Publik selama tahun 2019-2020 jumlah layanan yang telah dilakukan melalui MPP pada Tahun 2019 sebanyak 104.911 sedangkan tahun 2020 sebanyak 70.731 layanan. Penurunan jumlah layanan tersebut karena selama masa pandemi covid-19 layanan disebar pula ke masing-masing unit kerja untuk mencegah potensi kerumunan dan selama pemberlakuan WFH beberapa perangkat daerah yang tergabung dalam MPP juga melaksanakan pelayanan melalui online.

## 2. Penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*)

Penerapan ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Capaian pelayanan

melalui OSS yaitu NIB (Nomor Induk Berusaha) yang telah terbit melalui OSS pada tahun 2019 sebanyak 836 buah sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 436 buah

Izin yang telah diterbitkan melalui OSS sebanyak 307 izin selama tahun 2020 dari izin yang diakomodir melalui OSS meliputi 35 jenis izin.

### 3. SiCantik Cloud

Penggunaan aplikasi SiCantik Cloud untuk memberi dukungan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak diakomodir dalam OSS. Sampai tahun 2020 perizinan dan non perizinan yang telah diakomodir oleh SiCantik Cloud 14 jenis izin. Izin yang diterbitkan melalui SiCantik Cloud sebanyak 760 izin. Dari keseluruhan izin yang diterbitkan pada tahun 2020 diperlukan rata-rata waktu penyelesaian sampai 7 hari. Dibandingkan pada tahun 2019 diperlukan rata-rata waktu penyelesaian sampai 6 hari. Pada tahun 2018 diperlukan rata-rata waktu penyelesaian sampai 5 hari. Beberapa faktor yang mempengaruhi waktu penyelesaian izin yaitu ketaatan pemohon dalam melengkapi persyaratan permohonan setelah verifikasi, waktu yang dibutuhkan instansi terkait dalam memproses rekomendasi izin.

Adapun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini yaitu :

- 1) Pandemi covid-19 yang berpengaruh pada beberapa kegiatan dalam capaian sasaran pada kegiatan Penyelenggaraan pameran investasi tidak dapat dilaksanakan, kegiatan tersebut dilakukan sebatas koordinasi promosi investasi.
- 2) Pelaku usaha belum mengetahui tata cara untuk melakukan pelaporan LKPM secara online untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara mandiri masih rendah.
- 3) Keterbatasan keikutsertaan dalam pameran investasi dalam negeri maupun luar negeri
- 4) Terbatasnya informasi potensi / peluang investasi di Kabupaten Karangasem yang sesuai RTRW yang belum memenuhi kebutuhan informasi pelaku usaha.
- 5) Penguatan OSS oleh Pemda belum maksimal (data pendukung belum terintegrasi)
- 6) Pelayanan kegiatan non usaha tidak terakomodir di OSS

- 7) Pelaksanaan *online single submission (OSS)* belum diselaraskan dengan prosedur pelayanan yang ditetapkan.
- 8) Pemahaman Pelaku Usaha terhadap Sistem OSS rata-rata rendah
- 9) Kualitas SDM belum optimal dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan
- 10) Persyaratan administrasi yang berulang dalam setiap permohonan izin
- 11) Aplikasi SiCantik Cloud belum berjalan optimal

Beberapa langkah kerja telah dilaksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain :

1. Mendorong pelaku usaha dengan cara melaksanakan monitoring terhadap penyampaian LKPM serta mengingatkan kewajiban pelaku usaha lainnya.
2. Menyusun data potensi kabupaten Karangasem
3. Menggunakan SiCantik Cloud
4. Pendampingan melalui Ruang Assistensi Pendampingan Perizinan (RAPI) Perizinan dan Fasilitasi Pendaftaran OSS
5. Mengikuti Bimtek OSS, SiCantik Cloud, dan Bimtek peningkatan kapasitas aparatur lainnya secara online dan offline
6. Mengintensifkan penyampaian informasi perizinan yang berkelanjutan melalui media sosial

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan selama lima tahun periode pemerintahan kepala daerah mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Karangasem di masa depan, isu-isu tersebut jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, demikian pula sebaliknya jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan menentukan tujuan penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun beberapa permasalahan yang akan dihadapi lima tahun kedepan terkait dengan pelayanan publik yaitu prosedur pelayanan yang lambat, rumit dan masih

belum memenuhi harapan/keinginan masyarakat sehingga masih terdapatnya ketidakpuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan, pengaduan masyarakat, ketepatan dan ketanggapan aparatur dalam memberikan respon. Selanjutnya permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan urusan pemerintahan antara lain pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, pengembangan wawasan kebangsaan yaitu belum optimalnya kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang prima, belum optimalnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, masih rendahnya kompetensi SDM di bidang pelayanan publik.

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan menentukan tujuan penyelenggaraan perangkat daerah. Adapun isu-isu strategis yang dimaksud yaitu :

1. Nilai investasi di Kabupaten Karangasem masih relatif kecil dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Bali
2. Belum optimalnya kinerja DPM & PTSP dalam memberikan pelayanan publik

Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah isu-isu strategis berkenaan dengan penanaman modal dan pelayanan perijinan dimana dengan diberlakukannya otonomi daerah telah memberikan peluang kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan. Untuk lebih efektifnya upaya menarik investor asing ke daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengembangkan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dan sekaligus mengendalikan, mengawasi penanaman modal. Pengendalian penanaman modal menjadi penting karena salah terdapat tantangan untuk menghadirkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment) dengan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dan pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Kemudahan berusaha perizinan melalui penyederhanaan perizinan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi menjadi isu strategis ketika berhubungan dengan penguatan iklim penanaman modal yang muncul dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas,

efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui penyelenggaraan PTSP. Jika dikaitkan dengan isu strategis isu-isu nasional isu ini berhubungan dengan paket kebijakan presiden untuk meningkatkan ease of doing bussines. Dalam hal kebijakan perbaikan kemudahan berusaha seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD DPM & PTSP dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Secara garis besar rumusan program dan kegiatan maupun kebutuhan dana telah sesuai dengan adanya rancangan awal RKPD Kabupaten Karangasem

#### **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2020-2024 dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, diwujudkan melalui sembilan Misi, yang dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan, yaitu :

- 1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan,
- 2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan,
- 3) Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing,
- 4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan,
- 5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar,
- 6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim,
- 7) Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

#### 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan menentukan tujuan penyelenggaraan perangkat daerah. Adapun isu-isu strategis yang dimaksud yaitu :

1. Nilai investasi di Kabupaten Karangasem masih relatif kecil dibanding dengan kabupaten/kota lainnya di Bali.
2. Belum optimalnya kinerja DPM & PTSP dalam memberikan pelayanan publik

Beberapa faktor yang menjadi potensi dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

- 1) DPM & PTSP memiliki landasan kelembagaan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah dimana tugas dan fungsi DPM & PTSP untuk membantu Bupati dalam urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- 2) Memiliki landasan dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu Surat Keputusan Kepala DPM & PTSP No. 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedure pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta adanya pendelegasian wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem No. 61 Tahun 2020. Adapun jumlah ijin yang telah didelegasikan sebanyak 73 ijin dan 6 pelayanan non perijinan. Dalam hal perencanaan telah disusun pula RUPM dengan penetapan Peraturan Bupati No. 18 Tahun 2016, kajian investasi unggulan sector Primer dan sekunder
- 3) Dukungan ketentuan dan peraturan yang lebih tinggi dengan maksud memperbaiki kemudahan berusaha untuk mempercepat pertumbuhan investasi.
- 4) Kondisi potensi dan peluang investasi di Kabupaten Karangasem cukup beragam untuk mendorong realisasi investasi
- 5) Berkembangnya ekonomi digital dalam rangka mengimbangi perkembangan pasar pada era globalization 5.0 dalam pemanfaatan dan penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempermudah investor maupun calon investor. Sistem ini akan menjadi sebuah sistem yang terintegrasi yang mampu meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal.
- 6) Komitmen antara BKPM dengan Kementerian Kemeninfo terhadap pengembangan aplikasi umum seperti Pemanfaatan dan penerapan system SI Cantik Cloud untuk mengakomodir pelayanan izin yang tidak difasilitasi oleh system OSS. Beberapa peningkatan manfaat yang diperlukan guna mengoptimalkan layanan si Cantik Cloud seperti integrasi antara OSS dengan Si Cantik Cloud
- 7) Pengembangan data potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren serta kesesuaiannya dengan kapasitas daerah. Terkait potensi penanaman modal yang sesuai dengan tren, perlu adanya informasi yang komprehensif terkait peluang penanaman modal di daerah antara lain dengan melakukan pemetaan potensi sumber unggulan yang ada.

- 8) Adanya isu restrukturisasi manajemen ASN mengenai Jabatan Fungsional untuk meningkatkan profesionalisme ASN menjalankan tugas dan fungsinya.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi kelemahan dalam pencapaian target kinerja, yaitu :

- 1) Menurunnya realisasi investasi hal disebabkan oleh tidak tersedianya informasi mengenai potensi unggulan dimana sebelumnya penyajian potensi unggulan stagnan kajian potensi unggulan sektor primer dan sekunder dan tidak berlanjut pada tahapan pemetaan potensi sehingga tidak diketahui seberapa besar potensi Kabupaten Karangsem pada sektor tersier beserta pemetaannya.
- 2) Belum memiliki perencanaan strategi promosi penanaman modal, hal ini tidak terlepas dari potensi unggulan yang belum terpetakan sehingga promosi penanaman modal tidak dapat focus terhadap potensi apa saja yang ditawarkan. Promosi selama ini yang dilaksanakan terpusat pada keikutsertaan dalam pameran investasi bekerjasama dengan perangkat daerah lainnya
- 3) Rencana Aksi pada RUPM belum pernah dievaluasi.
- 4) Diperlukan peningkatan dalam mekanisme pendataan perusahaan serta pengendalian pelaksanaan dalam mengendalikan realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Kabupaten Karangsem, mengingat masih rendahnya kesadaran pengusaha dalam melaporkan perkembangan kegiatan selama melaksanakan kegiatan usaha.
- 5) Dengan berkembangnya era digital memungkinkan melakukan pekerjaan tanpa langsung melakukan pertemuan merupakan tantangan bagi penyedia layanan pelayanan public untuk menghadirkan pelayanan dengan basis digital.
- 6) Tantangan dalam pengembangan aplikasi OSS dan Si Cantik Cloud. Dimana sampai akhir 2020 jenis ijin yang dapat dilayani melalui aplikasi Si Cantik Cloud sebanyak 14 buah padahal harapannya bahwa semua ijin yang belum diakomodir dalam OSS dapat terakomodir dalam Si cantik cloud. Disini diperlukan sumber daya IT/programmer yang intens untuk pengembangan program serta kerjasama dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informasi karena pengembangan system si cantik cloud berada dibawah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Disisi lain output OSS berupa pencetakan izin belum dapat menyajikan data izin yang terbit yang terfiltrasi

sesuai kebutuhan sehingga penyajian data untuk kepentingan stakeholder masih manual.

- 7) Beberapa peningkatan manfaat yang diperlukan guna mengoptimalkan layanan OSS antara lain: Integrasi sistem OSS dengan rencana tata ruang di daerah agar perusahaan dapat mengetahui ketersediaan lahan pada saat memasukkan permohonan izinnya. Hal ini disebabkan banyak perusahaan yang ingin memulai usaha namun tidak dapat berjalan karena tidak sesuai dengan tata ruangnya;
- 8) SOP yang ada belum pernah direview dan evaluasi merupakan tantangan untuk menghadirkan perbaikan prosedur, syarat dan waktu dalam pelayanan perizinan dan non perizinan. Hal ini beberapa kali muncul sebagai tuntutan masyarakat sesuai hasil SKM yang dilakukan oleh DPM & PTSP.
- 9) Masih menggunakan kertas sebagai arsip, DPM & PTSP belum memiliki arsip yang terdigitalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka adapun tujuan yang ditetapkan yaitu :

1. Mewujudkan peningkatan investasi dalam rangka mendukung pengembangan sektor ekonomi
2. Mewujudkan peningkatan kepercayaan terhadap pelayanan penanaman modal untuk mendukung peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik

Dikaitkan dengan tujuan dan sasaran perangkat daerah isu-isu strategis berkenaan dengan penanaman modal dan pelayanan perijinan dimana dengan diberlakukannya otonomi daerah telah memberikan peluang kepada daerah untuk menarik investasi swasta sebagai salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan. Untuk lebih efektifnya upaya menarik investor asing ke daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengembangkan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investor dan sekaligus mengendalikan, mengawasi penanaman modal. Pengendalian penanaman modal menjadi penting karena salah terdapat tantangan untuk menghadirkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment) dengan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara terintegrasi dan pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan daya dukung lingkungan. Kemudahan perizinan melalui penyederhanaan perizinan dan mengembangkan sistem pelayanan informasi dan perizinan

investasi menjadi isu strategis ketika berhubungan dengan penguatan iklim penanaman modal yang muncul dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik melalui penyelenggaraan PTSP.

Jika dikaitkan dengan isu strategis isu-isu nasional isu ini berhubungan dengan paket kebijakan presiden untuk meningkat ease of doing bussines. Dalam hal kebijakan perbaikan kemudahan berusaha seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Mengacu pada visi dan misi kepala daerah dirumuskan suatu tujuan yang mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan pelayanan prima dalam perizinan. Adapun tujuan yang ingin di capai yaitu Peningkatan investasi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Berdasarkan atas tujuan yang telah ditetapkan, disusun masing-masing sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 2021-2026.

1. Meningkatkan realisasi investasi
2. Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal

### **3.3. Program dan Kegiatan**

Berikut adalah Program dan Kegiatan yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai hasil pemetaan

**Sasaran 1 : Meningkatkan realisasi investasi**

Dengan persaingan global dalam perekonomian dunia saat ini yang semakin ketat, kebijakan penanaman modal diarahkan untuk menciptakan daya saing dengan tujuan meningkatkan jumlah investasi sehingga masyarakat akan dihadapkan kepada multiplayer effect yang beragam. Sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana berikut :

**1. Program Pengembangan iklim penanaman modal****1.1 Kegiatan : Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan : Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman
- b. Sub Kegiatan : Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan penanaman modal

**1.2. Kegiatan : Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.**

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten Karangasem

**2. Program Promosi Penanaman Modal****2.1. Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

**3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota****3.1. Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota**

- a. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

- b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pemberian fasilitas/insentif daerah

## **Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan penanaman modal**

Perkembangan investasi di daerah merupakan salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Investasi yang dilakukan secara tepat dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menarik minat investasi di Kabupaten Karangasem diperlukan strategi dan kebijakan yang dapat menciptakan iklim kondusif bagi investasi.

Sebagai institusi publik opini masyarakat terhadap pelayanan sangat penting untuk menghadirkan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dengan tujuan mampu mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan, mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sasaran ini didukung oleh program dan kegiatan sebagaimana berikut :

### **1. Program Pelayanan Penanaman Modal**

#### **1.1. Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b. Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan
- d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah

## **2. Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal**

### **2.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada tingkat kabupaten/kota**

- a. Sub Kegiatan : Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

## **3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

### **3.1. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan RKA SKPD
- c. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD
- d. Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

### **3.2. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. Sub Kegiatan : Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

### **3.3. Kegiatan : Administrasi Umum**

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan logistik kantor
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- d. Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- e. Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD

### **3.4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan



- b. Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel
- c. Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**3.5. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat
- b. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik
- c. Sub Kegiatan : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

**3.6. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Sub Kegiatan : Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- c. Sub Kegiatan: Pemeliharaan mebel
- d. Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun program dan kegiatan diusulkan untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan/pengembangan pelayanan yaitu sebagai berikut :

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
2 18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2 18 .01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah		100	persen	5.740.967.218,00
2 18 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun		100	persen	35.996.400,00
2 18 01 2.01 01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	Amlapura	6	buku	34.091.100,00
2 18 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	Amlapura	20	buku	926.000,00
2 18 01 2.01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	Amlapura	20	buku	786.700,00
2 18 01 2.01 06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Amlapura	9	buku	192.600,00
2 18 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase penyelesaian administrasi keuangan		100	persen	2.937.610.093,00
2 18 01 2.02 01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan	Amlapura	12	bulan	2.900.665.293,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7				
		tunjangan ASN								
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	Amlapura	500	dokumen	36.944.800,00
2	18	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran</b>		100	persen	446.160.725,00
2	18	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	Amlapura	408	unit	15.000.000,00
2	18	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	Amlapura	12	bulan	202.514.925,00
2	18	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	Amlapura	150	buku	12.000.000,00
						Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas		19.720	lembar	
2	18	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Amlapura	1.800	eks	13.000.000,00
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Banyaknya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	Amlapura	68	kali	203.645.800,00
2	18	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase pengadaan barang milik daerah</b>		100	persen	160.000.000,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7
2 18 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas operasional yang diadakan	Amlapura	0	unit	-
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Banyaknya meubelair yang tersedia	Amlapura	20	unit	60.000.000,00
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Banyaknya peralatan yang diadakan	Amlapura	4	unit	100.000.000,00
<b>2 18 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>496.200.000,00</b>
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Banyaknya kendaraan dinas operasional yang diadakan	Amlapura	1.600	surat	49.000.000,00
2 18 01 2.08 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Banyaknya meubelair yang tersedia	Amlapura	7	rekening	379.200.000,00
2 18 01 2.08 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Banyaknya peralatan yang diadakan	Amlapura	476	unit	68.000.000,00
<b>2 18 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah</b>		<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>1.665.000.000,00</b>
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	Amlapura	12	unit	218.600.000,00
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Mebel	Banyaknya meubelair dan perlengkapan lainnya yang dipelihara	Amlapura	120	unit	250.000.000,00
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	Amlapura	24	unit	40.000.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	Amlapura	1	unit	1.156.400.000,00
<b>2 18 02</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>Persentase peningkatan perkembangan</b>		<b>5</b>	<b>persen</b>	<b>267.743.900,00</b>

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
				Volume	Satuan	
1	2	3	4	5	6	7
		penanaman modal				
2 18 02 2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi		6	jenis	222.117.200,00
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal ( SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	Amlapura	8	jenis	124.774.500,00
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	Amlapura	4	kali	97.342.700,00
2 18 02 2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya		8	kecamatan	45.626.700,00
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Banyaknya buku pemetaan potensi dan peluang usaha yang tersusun	Amlapura	0	buku	45.626.700,00
		Banyaknya buku profil investasi yang tersusun	Amlapura	50	buku	
2 18 03	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal		50	persen	293.933.050,00
2 18 03 2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya minat penanaman modal		656	minat	293.933.050,00
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	Amlapura	3	kali	293.933.050,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7
2	18	04			<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan</b>		96	persen	642.640.075,00
2	18	04	2.01		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota</b>		96	persen	642.640.075,00
2	18	04	2.01	01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM	Kab. Karangasem	96	persen	261.578.650,00
				Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan		Kab. Karangasem	96	persen		
				Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan		Kab. Karangasem	96	persen		
				Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika		Kab. Karangasem	96	persen		
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR	Kab. Karangasem	96	persen	228.123.200,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)							
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif				
				Volume	Satuan					
1	2	3	4	5	6	7				
		Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial	Kab. Karangasem	96	persen					
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Banyaknya pengaduan yang ditangani	Amlapura	18	pengaduan	28.157.150,00
					Banyaknya buku SKM yang dicetak	Amlapura	40	buku		
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah	Amlapura	8	kali	124.781.075,00
2	18	05			<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM</b>		5	persen	433.027.450,00
2	18	05	2.01		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>	<b>Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten</b>		50	pelaku usaha	433.027.450,00
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Karangasem	15	buku	136.434.450,00
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	Kab. Karangasem	30	orang	202.153.000,00
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Kab. Karangasem	25	kali	94.440.000,00
2	18	06			<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi</b>		75	persen	28.366.600,00

Kode Rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
								Volume	Satuan	
1					2	3	4	5	6	7
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan		90	persen	28.366.600,00
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perijinan dan non perijinan	Amlapura	250	orang	28.366.600,00
										7.406.678.293,00



## BAB V PENUTUP

Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, untuk menjamin terlaksananya program-program kegiatan yang tertuang rencana kerja tahun 2022 serta untuk terwujudnya sinergitas kerja semua unit kerja maka dalam pelaksanaannya memerlukan langkah-langkah strategis. Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan setiap unit kerja menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas
2. Renja Tahun 2022 lebih lanjut akan dijabarkan dalam RKA tahun 2022 dengan berpedoman pada KUA dan PPAS tahun 2022, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Karangasem
3. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program

Dengan RENJA Tahun 2022 yang diharapkan selanjutnya seluruh pegawai memiliki komitmen dalam pelaksanaan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan RENJA DPM & PTSP Kabupaten Karangasem Tahun 2022.

Amlapura, 05 Agustus 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Layanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Karangasem



Wayan Putu Erawan, SH., MM  
NIP. 19541231 199203 1 170

**FORMULIR TC.29**

**EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN KOTA**

**RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM**

**PERIODE TAHUN : 2022**

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
2		Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
2	12	urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal									
	01	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi perkantoran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>	
		1 Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen yang sah	1.525	1.005	200	200	100%	105	1.310	<b>86%</b>
		2 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening Telepon, Air, Listrik yang terbayar	7	7	7	7	100%	7	21	<b>300%</b>
		3 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah ATK yang tersedia	5.762	3.422	1131	1.131	100%	1.124	5.677	<b>99%</b>
			Jumlah ATK IT yang tersedia	490	198	150	148	99%	114	460	<b>94%</b>

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	4 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	710	470	150	150	100%	150	770	<b>108%</b>
		Jumlah fotocopy yang tersedia	108.585	55.785	20.000	17.433	87%	20.000	93.218	<b>86%</b>
	5 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/elektronik penerangan bangunan	Jumlah alat elektronika yang tersedia	376	69	294	294	100%	343	706	<b>188%</b>
	6 Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah alat-alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	3.188	1.458	549	549	100%	556	2.563	<b>80%</b>
		Jumlah peralatan kantor yang tersedia	2	0	1	1	100%		1	<b>50%</b>
	7 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar yang tersedia per tahun	12.725	6.529	2.920	2.920	100%	1.276	10.725	<b>84%</b>
	8 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyelenggaraan rapat-rapat yang terfasilitasi	40	26	3	6	200%	8	40	<b>100%</b>

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan		
					Target Renja PD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
	9	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat -rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang terfasilitasi	42	29	4	6	150%	10	45	107%
	10	Kegiatan Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis/keamanan	Upah tenaga administrasi, teknis dan pengemudi yang terbayarkan	42	42	42	40	95%	40	122	290%
	11	Kegiatan Penyediaan canang, bebanten dan piodalan	Jumlah sesajen sehari-hari dalam satu tahun	72.850	36.425	18.300	18.300	100%	18.300	73.025	100%
			Jumlah penyelenggaraan hari raya purnama, tilem dan nganyarin ke pura-pura dalam satu tahun	212	132	41	32	78%	62	226	107%
			Jumlah piodalan yang terselenggara	2	1	1	1	100%		2	100%
	12	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat -rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah yang terfasilitasi	122	104	0	-		28	132	108%
02	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	75%	75%	100%	100%	<b>100%</b>	
	1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas yang diadakan	4	-					-	0%

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	2	Pengadaan Meubeleur	Jumlah unit meubeler yang diadakan	-					-	<b>#DIV/0!</b>
	3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2	2	2	1	50%	3	<b>150%</b>
	4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	12	10	11	11	100%	11	<b>267%</b>
	5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan yang dipelihara	32	32	16	29	181%	24	<b>266%</b>
	6	Rehabilitasi sedang/berat bangunan gedung kantor	Bangunan gedung kantor dalam kondisi mantap	2					-	<b>0%</b>
05		<b>Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase sumber daya aparatur yang mengikuti bimtek</b>	50,00%	<b>38,81%</b>		-			<b>0%</b>
	1	Bimbingan teknis peraturan dan perundang - undangan	Jumlah peserta bimtek	40	20		-		20	<b>50%</b>
06		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja</b>	<b>Persentase laporan kinerja yang tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	100%	<b>100%</b>
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar ralisasi kinerja	-Jumlah buku laporan kinerja yang disusun	27	20	3	3	100%	3	<b>96%</b>

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan			
					Target Renja PD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4		
		-Jumlah buku LPPD yang disusun	15	8	2	2	100%	3	13	<b>87%</b>		
		-Jumlah buku LKPJ yang disusun	15	8	2	2	100%	3	13	<b>87%</b>		
		-Jumlah buku Laporan Keuangan yang disusun	20	11	4	4	100%	4	19	<b>95%</b>		
	2	Penyusunan Perencanaan kegiatan dan	- Jumlah renstra yang disusun	10	7		0		7	<b>73%</b>		
		- Jumlah IKU yang disusun	10	10		-			10	<b>100%</b>		
		- Jumlah RKT yang disusun	8	4	2	2	100%	2	8	<b>100%</b>		
		- Jumlah Renja yang disusun	14	10	2	2	100%	2	14	<b>100%</b>		
		- Jumlah DPA yang disusun	127	75	20	20	100%	30	125	<b>98%</b>		
		- Jumlah DPPA yang disusun	98	45	20	20	100%	20	85	<b>87%</b>		
1	19	17	<b>Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>	<b>Persentase keikutsertaan dalam perayaan hari-hari besar nasional dan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		
		1	Perayaan Hari-hari besar Nasional dan Daerah	Keikutsertaan dan perayaan Hari-hari besar nasional	5	3	1	1	100%	1	5	<b>100%</b>

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
		Keikutsertaan dan perayaan Hari-hari besar daerah	5	3	1	1	100%	1	5	100%
15	<b>Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi</b>	<b>Persentase tersebarnya informasi peluang investasi</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	1 Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Frekuensi terselenggaranya koordinasi bidang penanaman modal antara Pemda dan Dunia Usaha	5	3	1	2	200%	1	6	120%
	2 Penyelenggaraan pameran investasi	Frekuensi pameran investasi yang diikuti	9	7	1	-	0%	1	8	89%
	3 Monitoring dan evaluasi realisasi investasi	Jumlah buku laporan monev investasi	95	65	15	15	100%	12	92	97%
16	<b>Program Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi</b>	<b>Persentase tersedianya kajian prospek investasi sektor/ bidang usaha unggulan</b>	100%	50%	75%	75%	100%	100%		0%
		Persentase realisasi investasi	1%	-		-				0%
	1. Kajian profil investasi unggulan sektor sekunder	Jumlah Buku hasil kajian tentang prospek investasi unggulan sektor sekunder di Kabupaten Karangasem	100	50,000		-			50	50%

No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	2. Penyusunan profil investasi unggulan daerah kabupaten karangasem	Banyaknya buku profil investasi daerah	120	-	30	30	100%	20	50	42%
	3. Penyusunan pemetaan potensi unggulan daerah	Banyaknya buku pemetaan potensi unggulan daerah	2	-		-			-	0%
	4. Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Frekuensi pertemuan dengan calon investor	6	-		-			-	0%
18	<b>Program Bidang Pelayanan Bidang Perizinan</b>	<b>Persentase layanan ijin tepat waktu</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>	95%	100%	100%	100%
	1 Standar Pelayanan Minimal Perizinan	Jumlah permohonan yang teregistrasi	7.458	4.060	1.600	1.282	80%	1.600	6.942	93%
	2 Pelayanan Izin Penunjang Usaha	Jumlah izin penunjang usaha yang terbit	1.431	1.143	200	276	138%	200	1.619	113%
	3 Pelayanan Izin Usaha	Jumlah izin usaha yang terbit	3.750	2.550	600	1.038	173%	600	4.188	112%
	4 Pelayanan Tanda Daftar Usaha	Jumlah tanda daftar usaha yang terbit	1.084	1.064	10	9	90%	10	1.083	100%
	5 Monitoring dan evaluasi perijinan	Banyaknya Laporan Monitoring dan Evaluasi	15	-		-			-	0%
	6 Fasilitasi Perizinan Bangunan Gedung-Gedung Pemerintah	Terfasilitasinya pelayanan perizinan terhadap bangunan-bangunan milik Pemerintah	38	-		-			-	0%



No	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja PD tahun 2021 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun berjalan	
					Target Renja PD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja PD tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d 2021 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4
	7 Peningkatan Koordinasi Pelayanan Perijinan Goes To Banjar	Frekuensi pelayanan perizinan goes to banjar	34	15	0	-		8	23	<b>68%</b>
	8 Koordinasi dan fasilitasi mall pelayanan publik	Terfasilitasinya dan terkoordinasinya pelayanan perizinan dan non perizinan	76	76,000	76	76	100%	76	228	<b>300%</b>
	9 Koordinasi dan fasilitasi satgas percepatan berusaha	Jumlah laporan evaluasi yang disusun	6	1,000		-		2	3	<b>50%</b>
19	<b>Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat</b>	<b>Persentase pengaduan yang ditangani</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100%	100%	100%	<b>100%</b>
	1 Penyusunan IKM	Jumlah buku IKM yang disusun	400	240	80	80	100%	80	400	<b>100%</b>
	2 Penyampaian informasi kepada masyarakat	Jumlah masyarakat yang menerima informasi	1.600	918	320	320	100%	320	1.558	<b>97%</b>
<b>Jumlah</b>										
Rata-rata capaian kinerja (%)										
Predikat Kinerja										
Faktor Pendorong keberhasilan kinerja										
- Memiliki tujuan, sasaran, dan pendanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan										
- Memiliki pernyataan komitmen untuk pencapaian kinerja										
- Pelaksanaan kegiatan mendekati kesesuaian anggaran kas										
Faktor penghambat pencapaian kinerja										
- Beberapa kegiatan masih mengalami perubahan anggaran sehingga menunggu pengesahan perubahan anggaran										
- Terdapatnya pandemi covid 19 yang memerlukan penyesuaian dalam koordinasi kegiatan dan pergeseran anggaran										

**Tabel T-C. 30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NPSK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
					1 (th. 2017)	2 (th. 2018)	3 (th. 2019)	4 (th. 2020)	5 (th. 2021)	1 (th. 2017)	2 (th. 2018)	3 (th. 2019)	4 (th. 2020)	5 (th. 2021)	1 (th. 2017)	2 (th. 2018)	3 (th. 2019)	4 (th. 2020)	5 (th. 2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jumlah Investasi Asing (PMA)				2.557.219	2.582.791	2.608.619	2.634.705	2.661.052	4.705.811	259.971.181	1.780.006	1.255.250		184,02	10065,51	68,24	47,64	
2	Jumlah Investasi Dalam Negeri (PMDN)				165.063	166.714	168.381	170.065	171.765	176.056	3.367.220	200.965	142.285		106,66	2019,76	119,35	83,67	
3	Rata-rata lama pelayanan perizinan				6	5	5	3	3	1	5	6	7		600,00	100,00	83,33	42,86	
4	Hasil survey IKM				75,12	79,04	84	86	88	75,12	79,04	85,36	84,51		100,00	100,00	101,62	98,27	
5	Persentase pelayanan perizinan, Non Perizinan dan Pelayanan perijinan goes to banjar						90	95	100			100	0				111,11	0,00	

**TABEL T-C.31**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2021**  
**KABUPATEN KARANGASEM**

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana			
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12		
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>5.740.967.218,00</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>5.740.967.218,00</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>35.996.400,00</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>35.996.400,00</b>	
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Amlapura	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	6	buku	34.091.100,00	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Amlapura	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	6	buku	34.091.100,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Amlapura	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	20	buku	926.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Amlapura	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	20	buku	926.000,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Amlapura	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	20	buku	786.700,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Amlapura	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	20	buku	786.700,00	
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Amlapura	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	9	buku	192.600,00	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Amlapura	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	9	buku	192.600,00	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penyelesaian administrasi keuangan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>2.937.610.093,00</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penyelesaian administrasi keuangan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>2.937.610.093,00</b>	
5	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Amlapura	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	2.900.665.293,00	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Amlapura	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	2.900.665.293,00	
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Amlapura	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	500	dokumen	36.944.800,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Amlapura	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	500	dokumen	36.944.800,00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>446.160.725,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>446.160.725,00</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Amlapura	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	408 unit	15.000.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Amlapura	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	408 unit	15.000.000,00	
8	Penyediaan bahan logistik kantor	Amlapura	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	12 bulan	202.514.925,00	Penyediaan bahan logistik kantor	Amlapura	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas	12 bulan	202.514.925,00	
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Amlapura	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	150 buku	12.000.000,00	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Amlapura	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	150 buku	12.000.000,00	
			Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	19.720 lembar				Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas	19.720 lembar		
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Amlapura	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1.800 eks	13.000.000,00	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Amlapura	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	1.800 eks	13.000.000,00	
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amlapura	Banyaknya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	68 kali	203.645.800,00	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amlapura	Banyaknya penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas	68 kali	203.645.800,00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>160.000.000,00</b>	
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Amlapura	Banyaknya kendaraan dinas operasional yang diadakan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Amlapura	Banyaknya kendaraan dinas operasional yang diadakan	0 unit	-	
13	Pengadaan Mebel	Amlapura	Banyaknya meubelair yang tersedia	20 unit	60.000.000,00	Pengadaan Mebel	Amlapura	Banyaknya meubelair yang tersedia	20 unit	60.000.000,00	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Amlapura	Banyaknya peralatan yang diadakan	4 unit	100.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Amlapura	Banyaknya peralatan yang diadakan	4 unit	100.000.000,00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>496.200.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 persen</b>	<b>496.200.000,00</b>	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Amlapura	Banyaknya kendaraan dinas operasional yang diadakan	1.600 surat	49.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Amlapura	Banyaknya kendaraan dinas operasional yang diadakan	1.600 surat	49.000.000,00	
16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Amlapura	Banyaknya meubelair yang tersedia	7 rekening	379.200.000,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Amlapura	Banyaknya meubelair yang tersedia	7 rekening	379.200.000,00	
17	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Amlapura	Banyaknya peralatan yang diadakan	476 unit	68.000.000,00	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Amlapura	Banyaknya peralatan yang diadakan	476 unit	68.000.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>1.665.000.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	<b>1.665.000.000,00</b>	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Amlapura	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	12	unit	218.600.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Amlapura	Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara	12	unit	218.600.000,00	
19	Pemeliharaan Mebel	Amlapura	Banyaknya meubelair dan perlengkapan lainnya yang dipelihara	120	unit	250.000.000,00	Pemeliharaan Mebel	Amlapura	Banyaknya meubelair dan perlengkapan lainnya yang dipelihara	120	unit	250.000.000,00	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Amlapura	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	24	unit	40.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Amlapura	Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara	24	unit	40.000.000,00	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Amlapura	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	1	unit	1.156.400.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Amlapura	Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	1	unit	1.156.400.000,00	
	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>		<b>Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal</b>	<b>5</b>	<b>persen</b>	<b>267.743.900,00</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>		<b>Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal</b>	<b>5</b>	<b>persen</b>	<b>267.743.900,00</b>	
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi</b>	<b>6</b>	<b>jenis</b>	<b>222.117.200,00</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi</b>	<b>6</b>	<b>jenis</b>	<b>222.117.200,00</b>	
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Amlapura	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal ( SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	8	jenis	124.774.500,00	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Amlapura	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal ( SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	8	jenis	124.774.500,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
23	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Amlapura	Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	4	kali	97.342.700,00	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Amlapura	Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	4	kali	97.342.700,00	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya</b>	<b>8</b>	<b>kecamatan</b>	<b>45.626.700,00</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Banyaknya kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya</b>	<b>8</b>	<b>kecamatan</b>	<b>45.626.700,00</b>	
24	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Amlapura	Banyaknya buku pemetaan potensi dan peluang usaha yang tersusun	0	buku	45.626.700,00	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Amlapura	Banyaknya buku pemetaan potensi dan peluang usaha yang tersusun	0	buku	45.626.700,00	
		Amlapura	Banyaknya buku profil investasi yang tersusun	50	buku			Amlapura	Banyaknya buku profil investasi yang tersusun	50	buku		
	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal</b>	<b>50</b>	<b>persen</b>	<b>293.933.050,00</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal</b>	<b>50</b>	<b>persen</b>	<b>293.933.050,00</b>	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Banyaknya minat penanaman modal</b>	<b>656</b>	<b>minat</b>	<b>293.933.050,00</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Banyaknya minat penanaman modal</b>	<b>656</b>	<b>minat</b>	<b>293.933.050,00</b>	
25	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Amlapura	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	3	kali	293.933.050,00	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Amlapura	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	3	kali	293.933.050,00	
	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan</b>	<b>96</b>	<b>persen</b>	<b>642.640.075,00</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan</b>	<b>96</b>	<b>persen</b>	<b>642.640.075,00</b>	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota</b>	<b>96</b>	<b>persen</b>	<b>642.640.075,00</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota</b>	<b>96</b>	<b>persen</b>	<b>642.640.075,00</b>	
26	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM	96	persen	261.578.650,00	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM	96	persen	261.578.650,00	
		Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan	96	persen			Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan	96	persen		
		Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan	96	persen			Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan	96	persen		
		Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika	96	persen			Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika	96	persen		
25	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR	96	persen	228.123.200,00	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR	96	persen	228.123.200,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
		Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial	96	persen			Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial	96	persen		
28	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Amlapura	Banyaknya pengaduan yang ditangani	18	pengaduan	28.157.150,00	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Amlapura	Banyaknya pengaduan yang ditangani	18	pengaduan	28.157.150,00	
		Amlapura	Banyaknya buku SKM yang dicetak	40	buku			Amlapura	Banyaknya buku SKM yang dicetak	40	buku		
29	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Amlapura	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah	8	kali	124.781.075,00	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Amlapura	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah	8	kali	124.781.075,00	
	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM</b>	<b>5</b>	<b>persen</b>	<b>433.027.450,00</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM</b>	<b>5</b>	<b>persen</b>	<b>433.027.450,00</b>	
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten</b>	<b>50</b>	<b>pelaku usaha</b>	<b>433.027.450,00</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Banyaknya pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten</b>	<b>50</b>	<b>pelaku usaha</b>	<b>433.027.450,00</b>	
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	15	buku	136.434.450,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	15	buku	136.434.450,00	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian		Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	lokasi	Indikator kinerja	Target capaian			Kebutuhan Dana
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8	-9	-10		-11	-12
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	30	orang	202.153.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	30	orang	202.153.000,00	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	25	kali	94.440.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	25	kali	94.440.000,00	
	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi</b>	<b>75</b>	<b>persen</b>	<b>28.366.600,00</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi</b>	<b>75</b>	<b>persen</b>	<b>28.366.600,00</b>	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>	<b>90</b>	<b>persen</b>	<b>28.366.600,00</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>	<b>90</b>	<b>persen</b>	<b>28.366.600,00</b>	
33	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Amlapura	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perijinan dan non perijinan	250	orang	28.366.600,00	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Amlapura	Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perijinan dan non perijinan	250	orang	28.366.600,00	
						<b>7.406.678.293,00</b>						<b>7.406.678.293,00</b>	

Tabel T-C.32.

## Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

## Kabupaten Karangasem

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase dukungan operasional pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	Berdasarkan Renstra dan kajian perangkat daerah
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Amlapura	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu	6	buku	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Amlapura	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu	20	buku	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Amlapura	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu	20	buku	
4	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Amlapura	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	9	buku	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase penyelesaian administrasi keuangan</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	
5	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Amlapura	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12	bulan	
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Amlapura	Jumlah dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi	500	dokumen	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi umum perkantoran</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Amlapura	Persentase terpenuhinya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan	100	persen	
8	Penyediaan bahan logistik kantor	Amlapura	Persentase terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan piodalan, bebantenan dan perayaan hari-hari besar nasional dan daerah serta alat tulis kantor	100	persen	
9	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Amlapura	Persentase barang cetakan yang tersedia	100	persen	
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Amlapura	Persentase bahan bacaan yang tersedia	100	persen	
11	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Amlapura	Persentase rapat-rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	100	persen	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase pengadaan barang milik daerah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Amlapura	Jumlah kendaraan dinas operasional yang diadakan	0	unit	
13	Pengadaan Mebel	Amlapura	Jumlah meubelair yang tersedia	20	unit	
14	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Amlapura	Jumlah peralatan yang diadakan	4	unit	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Amlapura	Persentase pelayanan administrasi surat menyurat	100	persen	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
16	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Amlapura	Persentase terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air, Listrik dan Internet	100	persen	
17	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Amlapura	Persentase terpenuhinya kebutuhan jasa, alat-alat kebersihan dan bahan pembersih	100	persen	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>100</b>	<b>persen</b>	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Amlapura	Banyaknya kendaraan dinas yang terpelihara	12	unit	
19	Pemeliharaan Mebel	Amlapura	Persentase meubelair dan perlengkapan lainnya yang dipelihara	35%	persen	
20	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Amlapura	Persentase peralatan yang dipelihara	20	persen	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Amlapura	Banyaknya gedung kantor yang terpelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas	1	unit	
	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>		<b>Persentase peningkatan perkembangan penanaman modal</b>	<b>5</b>	<b>persen</b>	
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Banyaknya kemudahan berusaha yang difasilitasi</b>	<b>6</b>	<b>jenis</b>	
22	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Amlapura	Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal ( SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi	8	jenis	
23	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Amlapura	Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha	4	kali	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kecamatan yang terinformasikan keunggulan potensinya</b>	<b>8</b>	<b>kecamatan</b>	
24	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Amlapura	Banyaknya buku pemetaan potensi dan peluang usaha yang tersusun	0	buku	
		Amlapura	Banyaknya buku profil investasi yang tersusun	50	buku	
	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pelaku usaha yang mengajukan permohonan penanaman modal</b>	<b>50</b>	<b>persen</b>	
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah minat penanaman modal</b>	<b>656</b>	<b>minat</b>	
25	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Amlapura	Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan	3	kali	
	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase izin yang diterbitkan berdasarkan permohonan</b>	<b>96</b>	<b>persen</b>	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah/kabupaten/kota</b>	<b>96</b>	<b>persen</b>	

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Besaran/ Volume		Catatan
1	2	3	4	5		6
26	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM	96	persen	
		Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan	96	persen	
		Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan	96	persen	
		Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika	96	persen	
25	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR	96	persen	
		Kab. Karangasem	Persentase penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial	96	persen	
28	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Amlapura	Persentase pengaduan yang ditangani	90	persen	
		Amlapura	Jumlah buku SKM yang dicetak	40	buku	
29	Koordinasi dan sinkronisasi penetapan pemberian fasilitas/insentif daerah	Amlapura	Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah	8	kali	
	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>		<b>Persentase penanaman modal yang melaporkan LKPM</b>	<b>5</b>	<b>persen</b>	
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/kota</b>		<b>Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten</b>	<b>50</b>	<b>pelaku usaha</b>	
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal	15	buku	
31	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Banyaknya pelaku usaha yang dibina	30	orang	
32	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kab. Karangasem	Jumlah pengawasan pelaksanaan penanaman modal	25	kali	
	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>		<b>Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang menggunakan sistem aplikasi</b>	<b>75</b>	<b>persen</b>	
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan</b>	<b>90</b>	<b>persen</b>	
33	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Amlapura	Jumlah pengguna data dan penerima informasi perizinan dan non perizinan	250	orang	

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Karangasem  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.2.18.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.18.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2																	
2	18									7,406,678,293							7,906,678,293
2	18	01								5,612,865,293							6,112,865,293
2	18	01	2.01							43,600,000							43,600,000
2	18	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Banyaknya dokumen Perencanaan yang disusun tepat waktu		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		6 buku		35,600,000					35,600,000
2	18	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran yang disusun tepat waktu		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		20 buku		3,500,000					3,500,000
2	18	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Banyaknya dokumen anggaran perubahan yang disusun tepat waktu		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		20 buku		1,500,000					1,500,000
2	18	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Banyaknya laporan perangkat daerah yang disusun tepat waktu		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		9 buku		3,000,000					3,000,000
2	18	01	2.02									2,938,065,293					2,938,065,293
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		12 bulan		2,900,665,293					2,900,665,293
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Banyaknya dokumen SPJ, SPP dan SPM terverifikasi		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		500 dokumen		37,400,000					37,400,000
2	18	01	2.06									310,000,000					310,000,000
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Banyaknya komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		408 unit		15,000,000					15,000,000
2	18	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banyaknya penyediaan logistik untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		12 bulan		125,000,000					124,500,000
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Banyaknya barang cetakan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas Banyaknya penggandaan yang tersedia untuk operasional pelaksanaan tugas		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		150 buku 19720 lembar		12,000,000					12,500,000
2	18	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang tersedia		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		1800 eksemplar/t ahun		13,000,000					13,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Karangasem  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.2.18.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.18.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Banyaknya peyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi untuk operasional pelaksanaan tugas		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		68 kali		145,000,000					145,000,000
<b>2 18 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>							<b>160,000,000</b>						<b>115,000,000</b>
2 18 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Banyaknya kendaraan operasional yang diadakan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		0 unit		0					25,000,000
2 18 01 2.07 05	Pengadaan Mebel		Banyaknya meubelair yang tersedia		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		20 unit		60,000,000					0
2 18 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Banyaknya peralatan yang diadakan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		4 unit		100,000,000					90,000,000
<b>2 18 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>496,200,000</b>						<b>496,200,000</b>
2 18 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Banyaknya pelayanan administrasi surat menyurat		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		1600 surat		49,000,000					49,200,000
2 18 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Banyaknya terpenuhinya kebutuhan Telepon, Air, Listrik dan Internet		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		7 rekening		379,200,000					379,000,000
2 18 01 2.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Banyaknya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		476 unit		68,000,000					68,000,000
<b>2 18 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>							<b>1,665,000,000</b>						<b>2,210,000,000</b>
2 18 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Banyaknya kendaraan dinas yang dipelihara		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		12 unit		218,600,000					219,000,000
2 18 01 2.09 05	Pemeliharaan Mebel		Banyaknya meubelair dan perlengkapan lainnya yang dipelihara		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		120 unit		250,000,000					500,000,000
2 18 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Banyaknya peralatan dan mesin yang dipelihara		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		24 unit		40,000,000					40,000,000
2 18 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Banyaknya gedung kantor yang dipelihara untuk mendukung pelaksanaan tugas		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		1 unit		1,156,400,000					1,451,000,000
<b>2 18 02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>							<b>290,000,000</b>						<b>290,000,000</b>
<b>2 18 02 2.01</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>240,000,000</b>						<b>235,000,000</b>

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Karangasem  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.2.18.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.18.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 18 02 2.01 01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Banyaknya regulasi mengenai kemudahan penanaman modal ( SOP, SPM, SK tim teknis, MOU) dan pemberian informasi		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		8 jenis		140,000,000					135,000,000
2 18 02 2.01 02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		Banyaknya keterlibatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		4 kali		100,000,000					100,000,000
<b>2 18 02 2.02</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>							<b>50,000,000</b>						<b>55,000,000</b>
2 18 02 2.02 02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		- Banyaknya buku profil investasi yang tersusun		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		0 - 50 buku		50,000,000					55,000,000
<b>2 18 03</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>							<b>300,000,000</b>						<b>300,000,000</b>
<b>2 18 03 2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>300,000,000</b>						<b>300,000,000</b>
2 18 03 2.01 02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota		Banyaknya promosi investasi yang diselenggarakan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		3 kali		300,000,000					300,000,000
<b>2 18 04</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>							<b>710,000,000</b>						<b>710,000,000</b>
<b>2 18 04 2.01</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>							<b>710,000,000</b>						<b>710,000,000</b>
2 18 04 2.01 01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Pariwisata dan Ketenagakerjaan Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perhubungan dan Sektor Pendidikan Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perikanan dan Kelautan, Sektor Kesehatan dan Sektor Komunikasi dan Informatika Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Perindustrian, Perdagangan, dan Sektor Perkoperasian UMKM		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		96 persen 96 persen 96 persen 96 persen		220,000,000					220,000,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah  
Kabupaten Karangasem  
Tahun 2022**

Unit Organisasi : 2.18.2.18.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Sub Unit Organisasi : 2.18.2.18.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2022					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor Lingkungan Hidup, Sektor Pertanian dan Sektor Sosial Persentase Penyelesaian Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Sektor PUPR		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		96 persen 96 persen		247,900,000			247,900,000	
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan		Banyaknya buku SKM yang dicetak Banyaknya pengaduan yang ditangani		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		40 buku 18 pengaduan		32,100,000			32,100,000	
2	18	04	2.01	04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah		Banyaknya koordinasi dan sinkronisasi pemberian fasilitas/insentif daerah		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		8 kali		210,000,000			210,000,000	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>05</b>			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>										<b>443,813,000</b>		<b>443,813,000</b>
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>05</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>443,813,000</b>		<b>443,813,000</b>
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal		Banyaknya buku laporan pemantauan pelaksanaan penanaman modal		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		15 buku		147,220,000			147,220,000	
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal		Banyaknya pelaku usaha yang dibina		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		30 orang		202,153,000			202,153,000	
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal		Banyaknya pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		25 kali		94,440,000			94,440,000	
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>06</b>			<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>										<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>
<b>2</b>	<b>18</b>	<b>06</b>	<b>2.01</b>		<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>										<b>50,000,000</b>		<b>50,000,000</b>
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik		Banyaknya pengguna data dan penerima informasi perijinan dan non perijinan		Kab. Karangasem, Karangasem, Karang asem		250 orang		50,000,000			50,000,000	
<b>TOTAL</b>															<b>7,406,678,293</b>		<b>7,906,678,293</b>





BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 454/HK/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN PERUBAHAN RENCANA  
KERJA TAHUN 2021 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 36);

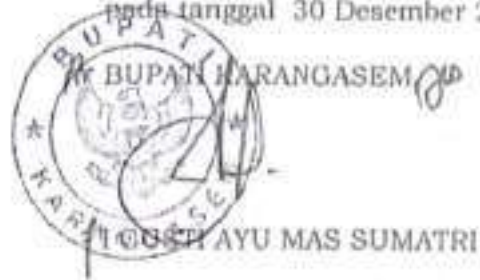
17. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 351/HK/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;
  - b. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;
  - c. mengolah data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;
  - d. menyiapkan dan menyusun Rancangan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem;
  - e. menyajikan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem; dan
  - f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem.
- KETIGA :** Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2022 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021 pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 30 Desember 2020



Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Bali, di Denpasar.
2. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, di Denpasar.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Provinsi Bali, di Denpasar.
4. Kepala Biro Penyusunan Program Setda Provinsi, di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Bali, di Denpasar.
6. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
8. Para Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
9. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
10. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
11. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
12. Kepala Bagian Pengendalian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura.
13. Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Karangasem, di Amlapura.
14. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 454 /HK/2020  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN  
 2022 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA  
 TAHUN 2021 PADA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU  
 PINTU KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN  
 PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2021 PADA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARANGASEM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati/Wakil Bupati Karangasem
2.	Wakil Pengarah I	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
3.	Wakil Pengarah II	Tim Ahli Bupati Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karangasem
4.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6.	Kelompok Kerja Pengaduan, Kebijakan dan Peningkatan Layanan	1. Kepala Bidang Data dan Informasi
		2. Kepala Seksi Pelayanan Pendaftaran
		3. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan Masyarakat
		4. Kepala Seksi Pelayanan Data dan Informasi
7.	Kelompok Kerja Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1. Kepala Bidang Perizinan
		2. Kepala Seksi Izin Penunjang Usaha
		3. Kepala Seksi Izin Usaha
		4. Kepala Seksi Tanda Daftar Usaha
8.	Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pengembangan, Pengendalian	1. Kepala Bidang Penanaman Modal
		2. Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal
		3. Kepala Seksi Promosi Penanaman Modal

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
	Pelaksanaan dan Promosi Penanaman Modal	4. Kepala Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
9.	Kelompok Kerja Pengumpul Data dan Informasi	1. Kasubag Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan 2. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Keuangan 3. Pelaksana pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


  
 BUPATI KARANGASEM, *[Signature]*  
 I GUSTI AYU MAS SUMATRI

**BERITA ACARA VERIFIKASI  
RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022**

Pada Hari Ini : **Jumat**, tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Pukul : **11.00 Wita** sampai dengan selesai, bertempat di **Ruang Rapat Sabha Niti Bappelitbangda Kabupaten Karangasem**, telah dilaksanakan verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah :

**DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
KARANGASEM**

Dengan hasil sebagaimana lembar verifikasi berikut :

**LEMBAR VERIFIKASI  
RANCANGAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022**

**PD : DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARANGASEM**

No	Aspek/Kegiatan	Ketersediaan		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	
1	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan Renja PD	√		
2	<b>SISTEMATIKA RENJA</b>			
	BAB I. PENDAHULUAN			
1.1	Latar Belakang	√		Perbaiki tahun sesuai dokumen yg disusun
1.2	Landasan Hukum	√		Landasan Hukum agar disesuaikan dengan Pedoman Penyajian Dokumen RKPD tahun 2022
1.3	Maksud dan Tujuan	√		Agar disesuaikan dengan pedoman penyusunan renja.
1.4	Sistematika Penulisan	√		Agar disesuaikan dengan pedoman penyusunan renja.



	BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	√		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cara pengisian Tabel TC. 29 agar berpedoman pada PMDN 86/2017 dan Program kegiatan dan subkegiatan tahun 2022 agar menyesuaikan dengan Hasil Pemetaan/Pemutakhiran PMDN 90/2019</li> </ul>
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cara pengisian Tabel TC.30 agar berpedoman pada PMDN 86/2017</li> </ul>
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√		Sudah sesuai dengan pedoman penyusunan renja.
2.4	Review terhadap Rancangan RKPD	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengisian Tabel TC.31 agar berpedoman pada Ranwal RKPD 2022.</li> <li>- Penyajian tabel-tabel agar pada format Excel dicantumkan sebagai lampiran.</li> </ul>
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabel sudah menuangkan usulan.</li> </ul>
	BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	√		Sudah sesuai dengan pedoman penyusunan renja.
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√		Agar disesuaikan dengan pedoman penyusunan renja.
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	√		Sesuai dengan arah kebijakan Pimpinan
3.3	Program dan Kegiatan	√		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Agar dinarasikan Pagu Anggaran sesuai kebutuhan Dinas dan Pagu yang termuat dalam RPJMD sehingga terdapat</li> </ul>

				selisih Pagu yang belum mendapatkan pendanaan, - Dalam tabel T-C.33 agar disajikan sesuai SIPD, prakiraan maju rencana tahun 2022. - Target Capaian Kinerja agar disesuaikan dengan indikator kinerja.
	BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		✓	Agar disesuaikan dengan pedoman penyusunan renja.
	BAB V. PENUTUP		✓	Agar disesuaikan dengan pedoman penyusunan renja.

Karangasem, 19 Maret 2021

PD yang diverifikasi	Tanda tangan	Tim Verifikasi :	Tanda Tangan
1. Ni Luh Putu Yayuk Suparmi	1. 	1. I Gusti Ayu Arwati, SE	1. 
Mengetahui Kepala DPM&PTSP Kabupaten Karangasem,  <b>I Wayan Putu Laba Erawan, SH, MM</b> Pembina Utama Muda NIP.19641231 199203 1 170		Mengetahui Kepala Bappelitbangda Kab. Karangasem,  <b>I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT</b> Pembina NIP. 19740720 199403 1 003	

**BERITA ACARA VERIFIKASI  
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022**

Pada Hari Ini : **Rabu**, tanggal **Empat** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**. Pukul : **12.00 Wita** sampai dengan selesai, bertempat di **Bappelitbangda Kabupaten Karangasem**, telah dilaksanakan verifikasi rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah :

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARANGASEM**

Dengan hasil sebagaimana lembar verifikasi berikut :

**LEMBAR VERIFIKASI  
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022**

No	Aspek/Kegiatan	Ketersediaan		Hasil Verifikasi
		Ada	Tidak Ada	
1	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusunan Renja PD	√		Ada
2	<b>SISTEMATIKA RENJA</b>			
	BAB I. PENDAHULUAN			
1.1	Latar Belakang	√		Sudah sesuai dengan pedoman penyusunan Renja
1.2	Landasan Hukum	√		Disesuaikan
1.3	Maksud dan Tujuan	√		Sudah sesuai dengan pedoman penyusunan Renja
1.4	Sistematika Penulisan	√		Disesuaikan dengan pedoman penyusunan Renja

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU			
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	√	Dalam Tabel TC. 29 karena terjadi perubahan nomenklatur sesuai dengan PMDN 90/2019 dan Kepmendagri 050-3708 maka program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel TC 29 mengalami perbedaan harus disesuaikan judul tabel pencapaian s/d tahun 2021
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	√	TC.30 target tahun 2022 disesuaikan dengan target di RPJMD
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	√	Agar disesuaikan dengan isu-isu strategis yg tercantum pada Renstra.
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	√	Sudah sesuai dengan pedoman penyusunan Renja
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	√	-
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH			
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	√	Sudah sesuai dengan pedoman penyusunan Renja
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	√	Sudah sesuai dengan pedoman penyusunan Renja
3.3	Program dan Kegiatan	√	Program dan Kegiatan sudah sesuai dengan SIPD, ada kesalahan no. 3.3 ditulis 1.3
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		√	Pendanaan di Renja sudah sesuai dengan Pagu di RKPD tahun 2022
BAB V. PENUTUP		√	Sudah sesuai dengan pedoman penyusunan Renja

Karangasem, 4 Agustus 2021

PD yang diverifikasi	Tanda tangan	Tim Verifikasi :	Tanda Tangan
I. Ni Luh Putu Yayuk Suparmi		1. I Gusti Ayu Arwati, SE	
<p>Mengetahui Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem,</p>  <p><b>I Nyoman Pujana Erawan, SH, MM</b> Pembina Utama Muda NIP.19641231 199203 1 170</p>		<p>Mengetahui Kepala Bappelitbangda Kab. Karangasem,</p>  <p><b>I Nyoman Siki Ngurah, ST., MT</b> Pembina Tk. I NIP. 19740720 199403 1 003</p>	